

**PERANAN KOMISI PENEGAK ETIKA PEMERINTAHAN  
DAERAH (KPEPD) KOTA SOLOK**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial  
Politik FIS UNP Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



**ERMAS TEDDY PRATAMA**

**05169/2008**

**PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK  
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2012**

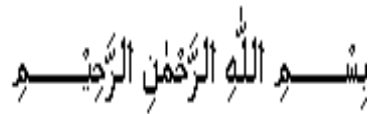
## ABSTRAK

### **ERMAS TEDDY PRATAMA, 2008/05169 : Peranan Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah (KPEPD) Kota Solok.**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan lahirnya Perda Kota Solok tentang Etika Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk mengatur aparatur pemerintah dan masyarakat dalam bersikap, bertindak, berucap dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas, fungsi, peran, wewenang dan tanggung jawab. Untuk mengawasi jalannya Perda Etika Pemerintahan Daerah maka dibentuk Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk mengawasi penerapan Perda tersebut. Dengan adanya Komisi ini maka diharapkan memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan Perda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah dalam menegakkan Perda Etika Pemerintahan Daerah di Kota Solok, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi implementasi Perda Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok, serta mengetahui tindak lanjut pelanggaran dalam pelaksanaan Perda Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan secara *purposive*. Sample data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumenter. Teknik analisis yang dipakai adalah analisa deskriptif kualitatif. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengecek balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan komisi penegak etika pemerintahan daerah Kota Solok belum terlaksana dengan baik terutama dalam pengawasan terhadap penerapan Perda Etika Pemerintahan daerah di dalam masyarakat. Hal ini di sebabkan karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat. Untuk itu maka Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah diharapkan untuk lebih melakukan pengawasan dikalangan masyarakat dan juga harus melakukan sosialisasi yang lebih giat lagi. Sosialisasi bukan hanya dilakukan di media cetak tetapi juga melalui media elektronik.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok”.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada program studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak masukan berupa motivasi, bantuan, bimbingan, saran dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. DR.Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang Padang.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku Ketua dan Ibu Henni Muchtar, SH, M.Hum sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik, yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.
3. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan, motivasi dan akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Helmi Hasan, M.Pd Selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan, motivasi dan akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Afriva Khaidir, SH, M. Hum, MAPA, Ph.D, Ibu DR. Isnarmi, M.Pd, MA dan Ibu Estika Sari, SH selaku anggota tim penguji, yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Suhatmi Tole selaku Ketua Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah (KPEPD) yang menjadi informan penelitian.
7. Teristimewa kepada Ayah dan Ibunda tercinta beserta keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berprestasi dan dengan doa, semangat, serta dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Rekan-rekanku program studi Ilmu administrasi Negara, terima kasih atas segala kebaikannya terutama bagi teman-teman tercinta IAN NR 08 serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat berbagai kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu kiranya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihaklah yang dapat memperbaiki karya penulis dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri penulis, Amin.

Padang , Juni 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. LatarBelakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Pembatasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Fokus Penelitian .....	7
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Manfaat Penelitian.....	8

### **BAB II KAJIAN PERPUSTAKAAN**

A. KAJIAN TEORITIS .....	9
B. KERANGKA KONSEPTUAL .....	30

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. JenisPenelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Informan Penelitian .....	32
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	33
E. Uji Keabsahan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data .....	35

### **BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum.....	38
1. Deskripsi Tentang Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok .....	38
2. Struktur Organisasi Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok .....	42
3. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok .....	44
B. Temuan Khusus.....	47
1. Peranan Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah .....	47
2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Perda Etika ...	53

3. Tindak Lanjut Dalam Pelanggaran Implementasi Perda Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok.....	58
C. Pembahasan.....	62
1. Peranan Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah ...	62
2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Perda Etika ...	63
3. Tindak Lanjut Dalam Pelanggaran Implementasi Perda Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok.....	65

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Tingkat Pendidikan Anggota Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok .....	41
Tabel 4.2	Data Absen Pegawai Bagian Organisasi Pada minggu ke-4 Bulan Mei 2012 .....	48
Tabel 4.3	Pelanggaran yang terjadi dilingkungan Sekda Kota Solok .....	51
Tabel 4.4	Pelaksanaan Pemberian Hukuman Terhadap Pelanggaran Perda Etika Tahun 2012 .....	53
Tabel 4.5	Jumlah Pegawai Masing- Masing Bagian Pada kantor Sekda Kota Solok 2012 .....	55
Tabel 4.6	Sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan .....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka konseptual .....	30
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok .....	42
Gambar 4.2	Absen Pegawai Bagian organisasi Kota Solok .....	48

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat dan laju globalisasi yang semakin meningkat, telah membawa perubahan yang signifikan terhadap wajah birokrasi Indonesia. Birokrasi yang awalnya dipersiapkan sebagai pelayan masyarakat bergeser kepada birokrasi yang minta dilayani. Perubahan nilai-nilai ini telah berimplikasi terhadap perilaku para birokrat itu sendiri.

Adanya budaya yang seolah-olah ingin dilayani mengakibatkan ketidaknyamanan masyarakat dalam berurusan. Untuk memperoleh pelayanan yang sederhana saja, pengguna jasa sering dihadapkan pada berbagai kesulitan. Kita sering melihat antrian panjang orang-orang yang akan membayar pajak, pengurusan KTP yang sangat lama. Padahal dalam kehidupan sehari-hari keberadaan birokrasi pemerintah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk menentukan aktivitas mereka.

Kenyataan yang sering ditemui di lapangan yaitu para pegawai tidak lagi merasa terdorong untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki prosedur kerja mereka. Bahkan kebanyakan justru menolak adanya perubahan. Etos kerja sekarang ini menimbulkan persepsi dalam masyarakat bahwa berhubungan dengan birokrasi berhadapan dengan berbagai prosedur yang berbelit-belit, memakan waktu dan menyebalkan. Yang lebih parah, prosedur yang mencekik itu seringkali ditunggangi oleh kepentingan pribadi dan dijadikan komoditas yang

diperdagangkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok (Wahyudi Kumorotomo, 2005:156 ).

Dalam penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia juga diwarnai oleh buruknya etika pemerintahan oleh penyelenggara Negara. Etika adalah nilai-nilai universal yang terbentuk dari budaya dan pelebagaan struktur yang terus-menerus. Nilai-nilai ini menjadi batas apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ukuran terhadap benar atau salah dalam ucapan dan tindakan seorang aparatur negara seringkali dibatasi oleh nilai yang dikontrol diri sendiri dan komunitas. Karena itu, menegakkan etika dalam pemerintahan lebih sulit dari pada menegakkan hukum ( Eko Prasajo 2009:169 ).

Begitu juga dalam dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditemukan adanya sikap, perilaku maupun ucapan penyelenggara pemerintah daerah yang kurang menunjukkan etika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sikap, perilaku maupun ucapan yang kurang etis tersebut dapat dilihat dalam praktek pembohongan publik, membuat pernyataan yang tidak benar, kurang terbuka atas informasi kepada masyarakat, kurang bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan tugas, tidak konsisten dalam pelaksanaan kebijakan atas hukum, berlaku diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di tengah maraknya masalah birokrasi ini timbul keinginan dari segelintir pihak untuk membuat sebuah kebijakan baru sehubungan dengan masalah yang selalu ada dalam birokrasi. Pemerintahan Kota Solok sudah mulai berangsur membenahi dan menata kembali para birokratnya. Pada tanggal 23 Januari 2008

pemerintah Kota Solok mengesahkan Perda Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok, melalui Perda Nomor 1 Tahun 2008 untuk mengatasi sekelumit masalah yang selalu ada dalam tatanan pemerintahan terutama masalah etika pemerintahan.

Prinsip dasar dari Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok ini didasarkan kepada nilai-nilai agama, budaya, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku. Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Solok terdiri dari eksekutif dan legislatif. Adapun jajaran tersebut meliputi kepala daerah, beserta perangkat daerahnya, dan jajaran Badan Usaha Milik Daerah, beserta seluruh unsur warga masyarakat yang terdiri dari individu, kelompok masyarakat dan kelompok kemasyarakatan yang berada di wilayah administratif Kota Solok berkewajiban untuk menaati Peraturan Daerah ini. Tujuan dari Perda Etika Pemerintah Daerah adalah untuk menegakkan etika bersikap, berperilaku, bertindak, berucap bagi setiap penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran, wewenang dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan ( Man Campay, 2008:162 ).

Gagasan untuk membentuk Undang-undang atau Peraturan Daerah tentang Etika Pemerintahan di Indonesia menimbulkan polemik. Pada satu sisi, etika bukanlah hukum positif yang harus diatur dalam satu produk hukum. Dengan kata lain, apakah sebuah etika memang dapat diundang-undangkan secara formal dalam bentuk hukum positif. Pemikiran ini memusat pada pertanyaan, apa yang harus di atur dalam sebuah produk hukum yang mengatur mengenai etika. Kelompok yang setuju dengan pembentukan produk hukum etika biasanya

didasarkan pada fakta, bahwa kondisi administrasi negara di Indonesia bersifat khusus, dimana etika tidak bisa hanya dipedomani dan menjadi standar nilai yang tidak tertulis. Karena itu etika pemerintahan harus dibungkus oleh suatu produk hukum formal. Pada umumnya, praktek Internasional terhadap etika pemerintahan lazimnya dibuat dalam suatu pedoman yang mengarahkan pada setiap ucapan dan tindakan penyelenggara negara. Kedua pendapat ini dapat diterima sesuai dengan tujuan dan kondisi lingkungan dimana tujuan itu akan dicapai.

Untuk melakukan pengukuran dan evaluasi serta mengawasi jalannya Perda Etika dibentuk Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah, yakni sebuah lembaga penegak kode etik Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dibentuk dalam sistem dan tatalaksana penegakkan etika penyelenggara pemerintahan di Kota Solok.

Hal pokok yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana peranan KPEPD dalam mengatasi pelanggaran terhadap Perda tentang etika. Jika dilihat dari tugas pokoknya KPEPD harus mengawasi penerapan norma etika pemerintah daerah, menverifikasi, mempertimbangkan serta melakukan proses persidangan dan menetapkan dapat dikatakan bahwa aparat birokrasi daerah terikat oleh nilai-nilai yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai ini harus dipedomani tidak saja oleh setiap pejabat birokrasi tetapi juga oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan di bentuknya Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah di harapkan pelaksanaan Perda Etika Pemerintahan Daerah dapat terlaksana dengan

baik di berbagai elemen. Pengawasan yang dilakukan oleh KPEPD tidak hanya pada aparatur pemerintahan saja akan tetapi juga terhadap masyarakat.

Ide Perda Etika ini berikut KPEPD-nya sangat mulia. Namun aplikasinya di lapangan tidak seperti gaungnya selama ini. Bayangkan saja, anggotanya merupakan orang-orang yang duduk di elemen yang akan diawasinya. Tentu saja mereka akan kesulitan saat mengambil tindakan ataupun rekomendasi. Hal ini turut melemahkan peran KPEPD sendiri.

Keberadaan KPEPD dan Perda Etika ini diharapkan tidak menjadi semacam proyek mercusuar yang efeknya tidak terasa namun pemko harus mengeluarkan biaya untuk ini.

Komisi ini telah berjalan sekitar 4 tahun setelah Perda Kota Solok Nomor 1/2008 tentang EPD dilahirkan. Perjalanan waktu yang tidak singkat tentunya untuk sebuah organisasi pemerintahan yang ditunjang atau didukung oleh berbagai fasilitas.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan Pada Pemda Kota Solok, tugas dan fungsi KPEPD belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari masih kurang peranan KPEPD dalam mengatasi masalah dalam menjalankan perda etika pemerintahan daerah. Misalnya tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh KPEPD terhadap pegawai yang kurang disiplin dalam bertugas. Kenyataan ini tentu saja tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya KPEPD. Di lain pihak juga adanya banyak factor yang mempengaruhi jalannya perda etika pemerintahan daerah. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan dalam menerapkan perda etika pemerintah

daerah. Berdasarkan fenomena di atas, penulis ingin melihat lebih lanjut mengenai “Peranan Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok”.

## **B. Identifikasi, Pembatasan, Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah, sebagai berikut :

- a. Kurangnya Peranan KPEPD dalam mengawasi penerapan Perda Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok.
- b. Aparatur pemerintah Kota Solok kurang memberikan ketauladan dalam melaksanakan tugas.
- c. Adanya pegawai yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugasnya.
- d. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPEPD terhadap penerapan Perda Etika

### **2. Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi permasalahannya pada Peranan Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok.

### **3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana peranan KPEPD dalam mengawasi penerapan norma Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok?
- b. Factor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Perda Etika Pemerintahan Daerah di Kota Solok?
- c. Bagaimana menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi dalam Perda Etika Pemerintahan Daerah yang dilakukan aparaturn pemerintahan?

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi focus penelitian ini adalah:

- a. Peranan Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok dalam mengawasi penerapan Perda Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok dilihat dari tugas pokok serta fungsinya.
- b. Faktor yang mempengaruhi Perda Etika Pemerintahan Daerah di Kota Solok yang terdiri dari faktor komunikasi, kemampuan aparaturn, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi.
- c. Cara menindaklanjuti pelanggaran dalam pelaksanaan Perda Etika Pemerintahan Daerah di Kota Solok.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui peranan KPEPD dalam mengawasi penerapan norma Etika Pemerintahan Daerah di Kota Solok

- b. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi implementasi Perda Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok
- c. Mengetahui tindaklanjut pelanggaran dalam pelaksanaan Perda Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok

**E. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep ilmu pengetahuan terutama tentang etika pemerintahan.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi terkait dalam pengambilan kebijakan untuk penerapan etika Pemerintahan Daerah Kota Solok.
3. Bagi peneliti lanjutan sebagai landasan berpijak untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam yang ada hubungannya dengan etika pemerintahan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya :

- d. Peranan Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah (KPEPD) kota solok dapat dilihat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yaitu mengawasi penerapan norma etika pemerintahan daerah, Memverifikasi, mempertimbangkan serta melakukan proses persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran norma etika pemerintahan daerah, Membuat rekomendasi pemberian sanksi kepada pimpinan unit kerja, pimpinan DPRD dan atau lembaga kemasyarakatan terkait yang berwenang memberi sanksi terhadap pelanggar norma etika pemerintahan daerah. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut masih menemukan kendala terutama dalam pengawasan terhadap penerapan norma etika pemerintahan daerah di kalangan masyarakat.
- e. Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan Perda Etika Pemerintahan Daerah adalah faktor komunikasi, faktor kemampuan aparatur, dan struktur birokrasi yang berpengaruh positif terhadap implementasi dan faktor kecendrungan-kecendrungan yang berpengaruh negatif terhadap implementasi.
- f. Tindak lanjut KPEPD terhadap aparatur pemerintah yang melanggar Perda Etika yaitu dengan memberi teguran atau pengertian serta membina aparatur yang melakukan pelanggaran. Namun jika pelanggaran yang

dilakukan berat maka harus dilakukan proses persidangan untuk menentukan sanksi yang akan di berikan.

#### **B. saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang diberikan kepada KPEPD adalah :

- a. Keberadaan KPEPD masih dibutuhkan dalam mengawasi penerapan Perda Etika Pemerintahan Daerah di seluruh kalangan termasuk masyarakat.
- b. KPEPD diharapkan juga melakukan sosialisasi mengenai Perda Etika Pemerintahan Daerah melalui media elektronik bukan hanya media cetak.

## Daftar Pustaka

- Amri Yousa.2007.Kebijakan Publi Teori dan Proses.Bandung : LP3AN
- Agus Subarsono.2005.Analisis Kebijakan Publik.Yogyakarta.Pustaka Pelajar
- Bagong Suyanto dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Kencana
- Bernadus Luankali. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Bandung : AMELIA Press
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Jakarta : PT Buku Kita
- Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Faisal Sanafiah. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Man Campay.2008.Komitmen Tiada Henti Menegakkan Pemerintahan yang Baik.Jakarta : LKPS Universitas Indonesia
- Pemerintah Kota Solok. 2009. *Etika Pemerintahan Daerah Sebagai Perwujudan Good Local Governance di Kota Solok*. Jakarta : Meilfa Media Publishing.
- Rahmadani Yusran dkk.2006.Buku Ajar(Kebijakan Publik).Padang: Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial
- Solichin Abdul Wahab. 1997. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Wahyudi Kumorotomo.2005. Etika Administrasi Negara.Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Widjaja. 2004. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Yeremias T. Keban. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar